

Dampak Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan PBBP2, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada DPPKAD Kabupaten Ciamis)

Ardinal Susanto¹, Ferey Herman^{2*}

^{1,2} Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46274

Korespondensi email: fereyunigal@gmail.com

ABSTRACT. *This research is motivated by initial observations that show that the Implementation of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies has not been optimal, as seen from the large number of tax arrears that must be fulfilled by the Ciamis Regency DPPKAD. PBBP2 (Rural and Urban Land and Building Tax) revenue has not reached the predetermined target. The increase in Regional Original Revenue (PAD) is carried out by following the right tax principles, including the application of sanctions for violations. This study uses a quantitative descriptive method with a population of 33 people, and a total sampling technique, so that the sample also totals 33 people. Data was collected using questionnaires. The results of the study show that the implementation policy of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies received a total score of 2262, which is included in the high category according to the benchmarks used. PBBP2 admissions at the Ciamis Regency DPPKAD received a total score of 2289, also in the high category. Based on hypothesis proof, the policy of implementing Law Number 28 of 2009 has an effect of 77.3% on the receipt of PBBP2 in the Ciamis Regency DPPKAD, while 22.7% is influenced by other factors that are not studied.*

Keywords: Policy, Tax, Revenue, Ciamis

ABSTRAK. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi awal yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal, terlihat dari banyaknya tunggakan pajak yang harus dipenuhi oleh DPPKAD Kabupaten Ciamis. Penerimaan PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) belum mencapai target yang telah ditentukan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip perpajakan yang tepat, termasuk penerapan sanksi untuk pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi sebanyak 33 orang, dan teknik pengambilan sampel total, sehingga sampel juga berjumlah 33 orang. Data dikumpulkan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapatkan skor total 2262, yang masuk dalam kategori tinggi menurut tolok ukur yang digunakan. Penerimaan PBBP2 di DPPKAD Kabupaten Ciamis mendapatkan skor total 2289, juga masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan pembuktian hipotesis, kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berpengaruh sebesar 77,3% terhadap penerimaan PBBP2 di DPPKAD Kabupaten Ciamis, sedangkan 22,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Kebijakan, Pajak, Penerimaan, Ciamis

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengaturan hubungan Pusat

dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam era Otonomi Daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri. Tentu saja tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.18 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2000, dan UU No.28 Tahun 2009 yang disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009, diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan penambahan 3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru, yaitu PBB perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Jenis pajak yang selama ini dipungut oleh Pusat, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB memang hampir seluruh penerimaan PBB dan BPHTB telah diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, pengalihan atas kedua jenis pajak tersebut menjadi pajak daerah tidak akan banyak berdampak terhadap tambahan beban masyarakat dan relatif bersifat netral terhadap fiskal nasional. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru yang dapat dipungut oleh beberapa daerah apabila memiliki potensi pajak yang memadai.

Walaupun demikian, pemberlakuan pemungutan pajak baru tersebut akan dilakukan secara bertahap. BPHTB dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2011, sedangkan Pajak Rokok dan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014. Selama masa peralihan tersebut, pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan menggunakan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Langkah-langkah penyempurnaan kebijakan dan peraturan pajak daerah sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dilakukan dengan menambah jenis pajak baru, yaitu Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan penambahan 4 jenis pajak ini, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

Sementara itu UU No.28 Tahun 2009 selain menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan basis pajak, antara lain; kendaraan pemerintah termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, seluruh pelayanan persewaan di hotel menjadi objek Pajak Hotel, dan catering/jasa boga termasuk dalam objek Pajak Restoran. Selain itu pajak hiburan yang tergolong mewah, tarif pajaknya dapat ditetapkan lebih tinggi, namun tidak lebih dari 75%, tarif Pajak Parkir yang semula 20% dinaikkan menjadi 30% dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C) dinaikkan menjadi 25% dari yang sebelumnya 20%. Kenaikan tarif pajak maksimum juga dilakukan terhadap beberapa jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sebelumnya masing-masing 5%, 10%, dan 5% diubah menjadi masing-masing 10%, 20% dan 10%.

Jika dilihat kembali, UU No.28 Tahun 2009 memang memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk memungut sendiri pajaknya dengan penambahan beberapa jenis pajak daerah baru serta perluasan basis pajak daerah. Bila dilihat dari sisi otonomi fiskal, peraturan ini sama sekali tidak mempunyai makna apabila tidak disertai dengan kewenangan dalam penetapan tarifnya. Daerah propinsi yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki diskresi (keleluasaan) dalam penetapan tarif, dalam UU ini diberikan

kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum.

Pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut akan mempermudah daerah mengaitkan pengenaan tarif dengan tingkat pelayanan (*the benefit tax-link*). Daerah dapat mendesain kebijakan tarif pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, atau menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi ke daerahnya. Melalui penguatan perpajakan daerah sebagaimana diuraikan di atas, struktur penerimaan daerah akan berubah dengan peningkatan peranan PAD dalam APBD secara signifikan. Pada tahun 2011 (tahun pertama pelaksanaan RUU ini secara efektif) peranan PAD terhadap APBD provinsi meningkat menjadi 63% dari semula 50% dalam tahun 2009, sedangkan peranan PAD kabupaten/kota meningkat menjadi 10% dari semula sebesar 7% dalam tahun 2009. Secara nasional peranan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19% menjadi 24%. Kondisi tersebut semakin baik pada tahun 2014, dimana semua daerah telah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dengan menerapkan tarif maksimum yang ditetapkan sesuai ketentuan UU ini. Peranan PAD terhadap APBD pada tahun 2014 meningkat menjadi 68% untuk provinsi dan 15% untuk kabupaten/kota. Secara nasional, peranan PAD terhadap APBD tahun 2014 mencapai 29% dari yang semula hanya 19%.

Sementara berdasarkan hasil survey awal, penulis menemukan beberapa hal yang terjadi pada DPPKAD Kabupaten Ciamis, sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tunggakan pajak yang harus dipenuhi oleh DPPKAD Kabupaten Ciamis.
- b. Penerimaan PBBP2 (Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) pada DPPKAD Kabupaten Ciamis, masih belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “DAMPAK KEBIJAKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PBBP2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN) (Studi pada DPPKAD Kabupaten Ciamis)”.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang digunakan. Berkaitan dengan penelitian ini digunakan salah satu metode yang di pandang tepat untuk memproses masalah yang dikemukakan. Metode yang dimaksud, adalah metode deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kompetensi Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis , cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, memiliki kompetensi yang baik dalam hal Behavioral Tools, Image Attribute, dan Personal Characteristic.

Hasil di atas menunjukkan bahwa kompetensi adalah menunjukkan gambaran seseorang yang mempunyai kompetensi untuk mengelola pekerjaan, atau secara lebih spesifik mempunyai kompetensi untuk merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai target. Dalam hal ini, istilah kompetensi yang pertama merujuk pada kemampuan secara umum untuk menjalankan sebuah job secara kompeten. Kedua, istilah kompetensi merujuk pada salah satu rangkaian perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi suatu jabatan dengan kompeten.

Untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, diperlukan adanya standar kompetensi. Prayitno dan Suprpto (2002 :2) dalam kertas kerjanya, mengatakan bahwa:

Standar kompetensi adalah spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Dengan demikian, untuk mengetahui kompeten tidaknya seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu adalah dengan membandingkan antara kompetensi orang tersebut dengan standar kompetensi.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Mitrani (1995 : 19) yang menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil.

Analisis Kinerja Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, cenderung tinggi.

Hasil di atas, menunjukkan bahwa kinerja karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan dengan baik, dimana menurut Rivai (2009:548) mengemukakan “kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.” Hasibuan (2007:94) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.” Sedangkan menurut Mangkunegara (2004:67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sulistiyani dan Rosidah (2003:223) menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernandin dan Russell (dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2003) juga mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu.

Pengaruh Kompetensi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kompetensi karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya jika karyawan memiliki kompetensi yang tinggi, maka kinerja karyawan akan semakin tinggi. Sebab bekal pencapaian kinerja adalah adanya kompetensi.

Hasil di atas sejalan dengan pendapat Sulistiyani (2003 :223) sebagai berikut : “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Secara definitif Bernandin dan Russell (dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2003) juga mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu.

Lebih lanjut Susanto, (2002:12) mendefinisikan Kompetensi sebagai berikut :
”Kompetensi adalah segala bentuk perwujudan, ekspresi, dan representasi dari motif, pengetahuan, sikap, perilaku utama agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik atau yang membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja superior”.

Sementara itu Syah (2000:229) mendefinisikan Kompetensi sebagai berikut:
”Mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan”.
Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

McClelland (dalam Rivai, 2009:299) mendefinisikan “kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.” Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para outstanding performers lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para average performers.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja aparatur nya, maka kinerja aparatur harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi.

4. SIMPULAN

- a. Kompetensi karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, memiliki kompetensi yang tinggi dalam hal *Behavioral Tools, Image Attribute, dan Personal Characteristic*.
- b. Kinerja karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, memiliki kinerja karyawan yang tinggi dalam hal *quantity of work, quality of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, personal qualities*
- c. Kompetensi karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya jika karyawan

memiliki kompetensi yang tinggi, maka kinerja karyawan akan semakin tinggi. Sebab bekal pencapaian kinerja adalah adanya kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal Bakhtiar. (2009). *Sistem Manajemen Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, M., & Baron, A. (1998). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmosoeparto, K. (2000). *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azwar, S. (2003). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Yogyakarta: Cendekia.
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality improvement as a strategy to build pesantren's brand credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Budianto, A., Bastaman, I. D., & Herman, F. (2020). Promotion mix, individual internal environment, and purchase decision making in minimarket. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(1).
- Daft, R. L. (2007). *Organization Theory and Design*. New York: West Publishing Company.
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent management in facing the demand of environmental changes: A study in Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Hasibuan, M. S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Heidjrachman, R., & Husnan, S. (2002). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. P. (2001). *Evaluasi Kinerja SDM (Cetakan Pertama)*. Bandung: Refika Aditama.
- Moehariono. (2009). *Sistem Manajemen Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Prabowo, F. H. E. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human capital management model: A perspective of internal supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>

- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' perceptions of academic supervision in a pandemic era; phenomenological review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization and local financial independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.0 for Windows*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.